



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Jumat, 19 September 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI

Stok Blanko KTP-el Aman hingga 2026

Dapat Hibah
196 Ribu Keping

SIDOARJO-Stok blanko KTP elektronik (KTP-el) di Kabupaten Sidoarjo dipastikan aman hingga 2026. Hal itu disampaikan Kepala

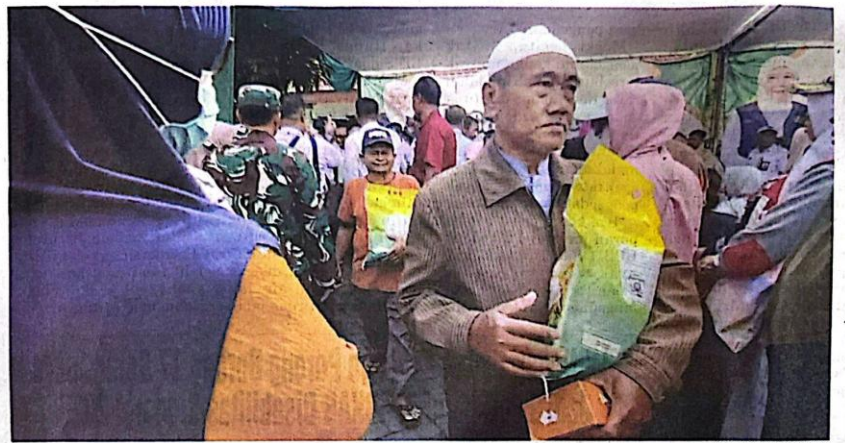
pada Dispendukcapil Sidoarjo, Reddy Kusuma saat sosialisasi hasil pengadaan hibah blanko KTP-el tahun anggaran 2025 di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kamis (18/9). Tahun ini Sidoarjo mendapat hibah sebanyak 196

ribu keping blanko KTP-el. Jumlah tersebut lebih besar dibanding kebutuhan rata-rata per tahun yang hanya 150 ribu keping. "Karena sekarang sudah masuk bulan September insya Allah stok aman

• Ke Halaman 1



DITERIMA: Secara simbolis penyerahan blanko KTP-el ke amat.



SENANG: Warga asal mendapatkan beras SPHP dengan harga murah.

Pemkab Gelontorkan 36 Ton Beras Setiap Hari

SIDOARJO-Pemkab Sidoarjo mulai menggelar operasi pasar beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kegiatan ini dilakukan di tiap-tiap desa maupun kelurahan secara bergantian. Setiap hari pemkab menjual 36 ton beras yang tersebar di 24 desa atau kelurahan. Penjualan dilakukan dalam dua tahap agar lebih merata.

Kepala Disperindag Sidoarjo, Widiyantor Basuki mengatakan, operasi pasar berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 12.00. Pemerintah desa diminta

menyiapkan lokasi penjualan dan membantu sosialisasi kepada warga.

"Targetnya beras yang kami bawa harus habis terjual di lokasi," ucapnya, Kamis (18/9).

Pada tahap pertama, pemkab hanya menyalurkan 1,5 ton beras atau sekitar 300 kemasan lima kilogram. Selanjutnya, total jatah per desa mencapai tiga ton.

"Total ada tiga ton per desa, ini akan berlangsung hingga akhir september," katanya.

• Ke Halaman 10

Antrean SKCK Membeludak, Petugas Layani hingga Tuntas



ML. LUDAK: Kepala (KA) SPKT Polresta Sidoarjo Iptu Setyo Budi sedang melayani masyarakat dalam pengurusan SKCK.

SIDOARJO-Antrean panjang di Polresta Sidoarjo terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ratusan pemohon rela menunggu berjam-jam demi mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), syarat penting penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Salah satu pemohon, Ainur Rosita, guru TK asal Kecamatan Sidoarjo, mengaku terbantu dengan layanan ekstra yang diberikan kepolisian meski harus antri lama. "Cepat tadi untuk pengurusan

• Ke Halaman 10

BKN : Mutasi Pejabat Pemkab Sudah Sesuai Aturan

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan mutasi pejabat pada Rabu kemarin (17/9/25). Para pimpinan perangkat daerah itu disumpahi dan dilantik untuk menduduki posisi baru atau diangkat dalam jabatan pelaksana tugas (Pit). Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan, proses mutasi tersebut sudah sesuai aturan dan ketentuan.

Pelantikan yang tanpa dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana, merasa kecewa tersebut tetap terlaksana.

Plt Kepala Kantor Regional (Kakanreg) II BKN, Basuki Ari Wikasono, menyampaikan bahwa dari segi manajemen tata negara, proses dan tahapan mutasi telah dilengkapi. Usulan dan izin mutasi pejabat Pemkab Sidoarjo sudah diajukan ke BKN Pusat dan disetujui, lalu hasilnya dikembalikan lagi ke daerah.

"Setelah itu sudah menjadi kewenangan bupati untuk meng-SK-kan dan melantik," jelas Basuki Ari kepada media usai pelantikan pejabat Pemkab Sidoarjo.

Apakah tahapan itu telah sesuai aturan? Basuki Ari memastikannya sudah lengkap. "Tentang rincian, SK, kemudian tahapannya apa saja, nanti dilakukan satu pintu

di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo. Yang jelas, kami tidak akan memberikan izin jika tahapan-tahapan atau syarat-syaratnya tidak dipenuhi," tegasnya.

Ditanya soal mutasi selanjutnya, Basuki Ari menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati Sidoarjo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). "Itu kewenangan bupati atau wali kota selaku PPK," imbuhnya.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, mutasi dan pelantikan pejabat tidak bisa dilakukan mendadak, melainkan butuh waktu beberapa pekan untuk memprosesnya. Nama-nama calon pejabat yang akan dimutasi diusulkan ke BKN Regional, kemudian ke BKN Pusat.

Menurutnya, penempatan pejabat dilakukan sesuai kompetensi melalui manajemen talenta, sehingga tidak ada lagi loncatan antar-eselon. "Pengembangan karir ASN disesuaikan dengan kompetensi, potensi, dan kinerja individu. Landasannya merit system sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN," jelas Subandi.

Ia juga menambahkan, Pemkab Sidoarjo telah menggunakan layanan I-MUT (Integrated Mutasi) untuk mencegah kesalahan serta melindungi ASN dari praktik kesewenangan. Kabupaten Sidoarjo termasuk daerah pertama di Indo-

nesia yang menerapkan manajemen talenta dan layanan I-MUT dalam penempatan pejabatnya.

"Jadi, izin mutasi itu prosesnya dari BKN Pusat ke regional, lalu ke daerah, kemudian diproses Tim Penilai Kinerja (TPK). Kita baru melantik setelah ada izin dari BKN," jelas Subandi.

Dalam sambutannya di hadapan para pejabat dan Kakanreg II BKN, Bupati Subandi menegaskan bahwa BKD adalah fondasi pembenahan pemerintahan. Ia berharap mutasi ini benar-benar sesuai arahan BKN.

"Mutasi, rotasi, dan promosi merupakan hal lumrah dalam pengembangan karir pegawai. Tidak ada istilah bupati senang atau tidak senang. Semua dijalankan dengan merit system. Insya Allah berjalan baik sesuai arahan BKN, baik oleh bupati, wakil bupati, maupun TPK ASN," katanya Kamis (18/9/25).

Mutasi di Kabupaten Sidoarjo diharapkan tidak hanya menempatkan pejabat yang cakap secara teknis, tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan yang kuat serta siap membawa perubahan. "Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama. Pejabat harus lebih inovatif, kreatif, cepat, dan tanggap serta berani membuat terobosan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat," pungkask Subandi. • Lee



Belasan Pemotor Terjungkal Akibat Tumpahan Minyak

SIDOARJO - Belasan pemotor terjungkal akibat tumpahan minyak di Jalan Raya Juanda, Rabu (17/9) malam. Beruntung, tidak ada yang terluka parah. BPBD Sidoarjo mengerahkan petugas pemadam kebakaran untuk membersihkan jalan beres-beres selama dua jam.

Staf Humas Damkar BPBD Sidoarjo Yoli Winau mengungkapkan, kejadian itu dilaporkan pukul 17.30. Tumpahan minyak terjadi saat seorang pengendara motor yang terjatuh tidak sempat berlari, ungkarnya. (edi/uz)

LIGIN: Petugas damkar membersihkan minyak yang berceceran di Jalan Raya Juanda, Rabu (17/9) malam.

Dispendukcapil Terima 196 Ribu Blangko E-KTP

Stok Aman hingga
Tahun Depan

SIDOARJO - Stok blanko KTP elektronik (e-KTP) di Kabupaten Sidoarjo dipastikan aman hingga 2026. Sebanyak 196 ribu keping blanko KTP-el sudah siap digunakan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo Reddy Kusuma menyampaikan, jumlah blanko yang datang lebih besar dibandingkan kebutuhan rata-rata per tahun yang mencapai sekitar 150 ribu

keping. "Sidoarjo ini setahun bisa 150 ribu cetak KTP, karena sekarang sudah masuk bulan September, insya Allah stok yang masuk aman sampai 2026," ujarnya saat sosialisasi hasil pengadaan hibah blanko e-KTP tahun anggaran 2025 kemarin (18/9).

Reddy menjelaskan, pengadaan blanko tersebut dilakukan melalui Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Pemkab Sidoarjo hanya mentransfer dana hibah senilai Rp 2 miliar, sementara proses pengurusan e-KTP di kantor kecamatan masing-masing sesuai domisili. (ezs/uz)



STOK MELIMPAH: Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nashih (tengah) didampingi Kepala Dispendukcapil Sidoarjo Reddy Kusuma menyerahkan blanko kepada Camat Candi Yuni Ramawati di Kantor BKD Sidoarjo kemarin (18/9).

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan
Sekretariat DPRD Sidoarjo

Pemkab Sidoarjo Raih Penghargaan Gajah Mada Digital Transformation Governance Index Award 2025



SIDOARJO, [SOROTMATA.COM](https://sorotmata.com) – Pemkab Sidoarjo berhasil meraih penghargaan Gajah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Award 2025 dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Pemkab Sidoarjo menjadi salah satu top 10 Kabupaten dengan nilai tertinggi se-Indonesia di urutan kelima. Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Dinas Kominfo Sidoarjo Eri Sudewo mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi dari Wakil Menteri Komdigi RI Nezar Patria disela-sela kegiatan Seminar Nasional GM-DTGI Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo UGM, Kamis (18/9/2025).

GM-DTGI sendiri merupakan sebuah indeks inovatif yang dirancang untuk menilai kinerja transformasi digital Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. GM-DTGI ini sendiri diluncurkan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) melalui Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI) tahun lalu. GM-DTGI menjadi instrumen untuk mengevaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan inovasi digital lainnya yang diterangkan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Sekdin Kominfo Sidoarjo Eri Sudewo mengatakan penghargaan tersebut adalah buah kerja keras bersama mewujudkan digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. Sejak tahun 2019 lalu penerapan SPBE sudah dilakukan Pemkab Sidoarjo. Bahkan sampai saat ini sudah ada 120 aplikasi pelayanan publik yang telah disediakan.

“Digitalisasi layanan publik ini akan menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,” ucapnya.

Menurutnya penghargaan GM-DTGI menjadi bentuk pengakuan kinerja transformasi digital yang telah diterangkan Pemkab Sidoarjo. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemkab Sidoarjo untuk terus mengembangkan layanan publik berbasis digital.

“Ini merupakan apresiasi yang tinggi yang akan memotivasi Pemkab Sidoarjo untuk terus berbenah dalam memberikan pelayanan publik yang baik lewat digitalisasi,” ucapnya.

Ia juga mengatakan Pemkab Sidoarjo berkomitmen mewujudkan transformasi digital berkelanjutan. Pelayanan publik digital akan terus dikembangkan. Begitu pula dengan penguatan infrastruktur digital untuk mendukung layanan berbasis teknologi. Menurutnya di era digital saat ini layanan publik berbasis digital sudah menjadi keharusan. Hal itu untuk menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik.

“Digital governance menjadi komitmen Pemkab Sidoarjo untuk bertransformasi menjadi kota modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang cepat, tepat dan transparan,” ujarnya.

Ketua Peneliti GM-DTGI Prof. Syaiful Ali mengatakan GM-DTGI menjadi instrumen untuk mengukur, mendorong dan memperkuat transformasi digital pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Tahun ini penilaian dilakukan terhadap 508 pemerintah kabupaten kota se Indonesia. Ia mengatakan indeks GM-DTGI dibangun atas tujuh pilar utama yang mengacu pada praktek terbaik global di bidang tata kelola transformasi digital. Pilar-pilar tersebut mencakup aspek teknologi, manusia, proses data organisasi hingga keamanannya.

“Penilaian ini tidak hanya menempatkan daerah terbaik dalam peringkat, melainkan juga sebagai refleksi pembelajaran bersama seluruh pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia berharap GM-DTGI menjadi acuan yang kredible sekaligus dinamis dalam menghadapi perkembangan digital yang begitu cepat. Ia juga berharap GM-DTGI award dapat memacu semangat daerah untuk terus meningkatkan tata kelola transformasi digital demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik.

“Forum ini juga kami harapkan menjadi ajang bagi kabupaten kota untuk saling belajar, berbagi informasi dan pengalaman terbaik dalam tata kelola transformasi digital di daerahnya masing-masing,” ucapnya. (Nuri)

Cetak KTP Kini Bisa di Kecamatan, Warga Sidoarjo Tak Perlu ke MPP Lagi



SIDOARJO, **SOROTMATA.COM** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar rapat koordinasi di Aula BKD Sidoarjo, Kamis (18/9/2025) terkait percepatan layanan perekaman dan pencetakan KTP-el di tingkat kecamatan. Hal ini menyusul diterimanya hibah 196 ribu keping blangko KTP-el dari pemerintah pusat, setelah sebelumnya pelayanan pencetakan dipusatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Lingkar Timur, karena keterbatasan stok blangko.

Dalam rapat yang dihadiri camat se-Kabupaten Sidoarjo itu, Kepala Disdukcapil Sidoarjo, Reddy Kusuma, menegaskan bahwa mulai periode pertama distribusi, setiap kecamatan akan menerima 1.500 keping blangko. Jumlah tersebut akan terus ditambah sesuai kebutuhan dan ketersediaan.

“Blangko ini akan dikelola secara ketat dengan sistem, agar pendistribusian benar-benar tepat sasaran. Dengan begitu, masyarakat bisa kembali merekam dan mencetak KTP di kecamatan masing-masing tanpa harus antri di MPP,” ujar Reddy.

Reddy menjelaskan, pelaksanaan pelayanan cetak KTP akan diprioritaskan bagi warga yang masuk kategori wajib KTP semula, penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta mereka yang memiliki kebutuhan mendesak seperti untuk keperluan berobat. Selain itu, pelayanan juga diberikan bagi masyarakat yang KTP-nya hilang, rusak maupun yang memerlukan perubahan elemen data.

Ia juga menegaskan bahwa KTP elektronik yang diterbitkan berlaku seumur hidup, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan perpanjangan meskipun di fisik kartu masih tercantum masa berlaku tertentu. Dengan adanya tambahan hibah blangko KTP dari pemerintah pusat ini, maka mulai hari Jumat 19 September nanti, perekaman dan pencetakan KTP sudah bisa dilakukan di 18 Kecamatan sesuai domisili masing-masing.

“Dan yang paling penting, semua layanan adminduk termasuk rekam dan cetak KTP dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bersifat gratis, tanpa dipungut biaya. Kalau sampai ada, itu termasuk pungli dan bisa dilaporkan,” pungkas Reddy. (Nuri)

Kabar Baik! 7.223 Rumah di Sidoarjo Segera Nikmati Jaringan Gas Bumi



SIDOARJO, SOROTMATA.COM – Kabar gembira untuk masyarakat Sidoarjo. Bupati Subandi mendapat bantuan jaringan distribusi gas bumi sebanyak 7.223 sambungan rumah (SR) dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM.

Bupati Sidoarjo, Subandi telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM dengan 15 pemerintah kabupaten/kota untuk bantuan jaringan distribusi gas bumi di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Kamis (18/9/2025).

Bupati Sidoarjo, Subandi, yang hadir langsung dalam penandatanganan itu, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan.

“Alhamdulillah Kabupaten Sidoarjo mendapat bantuan sebanyak 7.223 SR untuk dua kecamatan, yakni Waru dan Candi. Ini langkah besar untuk masyarakat agar bisa merasakan energi yang lebih murah,” ucap Subandi.

Dari Provinsi Jawa Timur, hanya Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Total bantuan jaringan gas bumi yang digelontorkan Ditjen Migas mencapai 115.264 Sambungan Rumah (SR).

Kabupaten Sidoarjo sendiri mendapatkan bantuan jaringan gas sebanyak 7.223 SR, yang akan dibangun di Kecamatan Waru dan Candi.

Menurut Subandi penggunaan jaringan gas jauh lebih ekonomis dibandingkan LPG 3 kg. Dalam satu bulan diperkirakan hanya membutuhkan biaya Rp. 34.000. Ketika menggunakan LPG bisa menghabiskan 6 tabung LPG 3 Kg.

“Bagi masyarakat yang mendapat bantuan ini, ayuk bersama-sama mengelola dengan baik agar berjalan lancar, dan semoga ke depan mampu menopang perekonomian Sidoarjo,” tambahnya.

Sementara Dirjen Migas, Laode Sulaeman menjelaskan, pengerjaan proyek jaringan gas bumi ini dilakukan melalui skema kontrak dan dimulai pada November 2025.

“Pemerintah pusat berharap, dengan adanya MoU ini, pemerintah daerah segera menyiapkan berbagai aspek teknis maupun administratif agar pelaksanaan pembangunan berjalan tanpa hambatan,” ujarnya.

Kehadiran jaringan gas bumi ini bukan hanya untuk menekan biaya energi rumah tangga, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi energi nasional menuju sumber energi yang lebih bersih, murah, dan berkelanjutan.

“Pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi bersih dan efisien melalui distribusi jaringan gas bumi untuk rumah tangga,” pungkasnya. (Nuri)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo Distribusikan 196 Ribu Blangko KTP-el ke Kecamatan



Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar rapat koordinasi di Aula BKD Sidoarjo, Kamis (18/9/25) terkait percepatan layanan perekaman dan pencetakan KTP-el di tingkat kecamatan.

A A A

JATIMRAYA.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar rapat koordinasi di Aula BKD Sidoarjo, Kamis (18/9/25) terkait percepatan layanan perekaman dan pencetakan KTP-el di tingkat kecamatan. Hal ini menyusul diterimanya hibah 196 ribu keping blangko KTP-el dari pemerintah pusat, setelah sebelumnya pelayanan pencetakan dipusatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Lingkar Timur, karena keterbatasan stok blangko.

Dalam rapat yang dihadiri camat se-Kabupaten Sidoarjo itu, Kepala Disdukcapil Sidoarjo, Reddy Kusuma, menegaskan bahwa mulai periode pertama distribusi, setiap kecamatan akan menerima 1.500 keping blangko. Jumlah tersebut akan terus ditambah sesuai kebutuhan dan ketersediaan.



"Blangko ini akan dikelola secara ketat dengan sistem, agar pendistribusian benar-benar tepat sasaran. Dengan begitu, masyarakat bisa kembali merekam dan mencetak KTP di kecamatan masing-masing tanpa harus antre di MPP," ujar Reddy.

Reddy menjelaskan, pelaksanaan pelayanan cetak KTP akan diprioritaskan bagi warga yang masuk kategori wajib KTP pemula, penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta mereka yang memiliki kebutuhan mendesak seperti untuk keperluan berobat. Selain itu, pelayanan juga diberikan bagi masyarakat yang KTP-nya hilang, rusak, maupun yang memerlukan perubahan elemen data.

Ia juga menegaskan bahwa KTP elektronik yang diterbitkan berlaku seumur hidup, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan perpanjangan meskipun di fisik kartu masih tercantum masa berlaku tertentu. Dengan adanya tambahan hibah blangko KTP dari pemerintah pusat ini, maka mulai hari Jumat 19 September nanti, perekaman dan pencetakan KTP sudah bisa dilakukan di 18 Kecamatan sesuai domisili masing-masing.

"Dan yang paling penting, semua layanan adminduk termasuk rekam dan cetak KTP dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bersifat gratis, tanpa dipungut biaya. Kalau sampai ada, itu termasuk pungli dan bisa dilaporkan," pungkas Reddy. (fid)

Stok Blanko KTP-el Aman hingga 2026

Dapat Hibah 196 Ribu Keping

SIDOARJO-Stok blanko KTP elektronik (KTP-el) di Kabupaten Sidoarjo dipas-tikan aman hingga 2026. Hal itu disampaikan Ke-

pala Dispendukcapil Sidoarjo, Reddy Kusuma saat sosialisasi hasil pengadaan hibah blanko KTP-el tahun anggaran 2025 di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kamis (18/9).

Tahun ini Sidoarjo men-dapat hibah sebanyak 196

ribu keping blanko KTP-el. Jumlah tersebut lebih be-sar dibanding kebutuhan rata-rata per tahun yang hanya 150 ribu keping.

“Karena sekarang sudah masuk bulan September, insya Allah stok aman

● Ke Halaman 10



DITERIMA: Secara simbolis penyerahan blanko KTP-el ke amat.

M. SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO



Stok Blanko KTP-el...

sampai 2026, dengan begitu, masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan blanko, ucapnya saat di-temui Radar Sidoarjo.

Reddy menjelaskan, pengadaan

blanko dilakukan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Pemkab Sidoarjo hanya mentransfer dan hibah Rp 2 miliar, sementara prosesnya diurus pusat.

“Prosesnya memakan waktu tujuh bulan, blanko baru datang kemarin dan langsung diserahkan ke

kami,” jelasnya.

Setelah diterima, blanko segera didistribusikan ke kecamatan. Tahun awal setiap kecamatan mendapat jatah 1.500 keping atau total 27.500 keping.

“Nanti kalau sudah habis, kecamatan

bisa mengambil lagi ke kami,” katanya.

Dengan sistem distribusi terse-but, warga bisa mengurus KTP-el di kecamatan masing-masing sesuai domisili. Sehingga, tidak harus datang ke Mal Pelayanan Publik (MPP) lagi.

Reddy menambahkan, ketersediaan blanko tahun 2027 masih menunggu petunjuk pusat.

“Apakah ada hibah lagi atau tidak itu tergantung pimpinan, yang jelas kebutuhan masyarakat sampai 2026 sudah aman,” pungkasnya. (saigun)





M. SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

SENANG: Warga usai mendapatkan beras SPHP dengan harga murah.

Pemkab Gelontorkan 36 Ton Beras Setiap Hari

SIDOARJO-Pemkab Sidoarjo mulai menggelar operasi pasar beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kegiatan ini dilakukan di tiap-tiap desa maupun kelurahan secara bergantian. Setiap hari pemkab menjual 36 ton beras yang tersebar di 24 desa atau kelurahan. Penjualan dilakukan dalam dua tahap agar lebih merata.

Kepala Disperindag Sidoarjo, Widiyantoro Basuki mengatakan, operasi pasar berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 12.00. Pemerintah desa diminta

menyiapkan lokasi penjualan dan membantu sosialisasi kepada warga.

"Targetnya beras yang kami bawa harus habis terjual di lokasi," ucapnya, Kamis (18/9).

Pada tahap pertama, pemkab hanya menyalurkan 1,5 ton beras atau sekitar 300 kemasan lima kilogram. Selanjutnya, total jatah per desa mencapai tiga ton.

"Total ada tiga ton per desa, ini akan berlangsung hingga akhir september," katanya.

● Ke Halaman 10



 **RADAR**
SIDOARJO.ID

Pemkab Gelontorkan...

Harga beras SPHP dipatok Rp 55 ribu per sak isi lima kilogram. Angka itu lebih murah dibanding harga pasaran yang mencapai Rp 60 ribu.

Penjualan juga tetap digelar pada akhir pekan, saat Sabtu (20/9) maupun Minggu (21/9) beras murah tetap tersedia. Widiyantoro menambahkan, pemkab menargetkan 6.750 ton beras SPHP tersalurkan

ke masyarakat. Saat ini baru 1.592 ton yang terealisasi.

Masih ada sekitar 5.158 ton beras yang siap digelontor. "Stok tersebut kami pastikan aman hingga akhir program," pungkasnya. (sai/gun)

 **RADAR**
SIDOARJO.ID

Antrean SKCK Membeludak, Petugas Layani hingga Tuntas



SIDOARJO-Antrean panjang di Polresta Sidoarjo terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ratusan pemohon rela menunggu berjam-jam demi mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), syarat penting penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Salah satu pemohon, Ainur Rosita, guru TK asal Kecamatan Sidoarjo, mengaku terbantu dengan layanan ekstra yang diberikan kepolisian meski harus antre lama. "Cepat tadi untuk pengurusan

ML... LUDAK. Kepala (KA) SPKT Polresta Sidoarjo Iptu Setyo Budi sedang melayani masyarakat dalam pengurusan SKCK.

DIKY SANSIRI/RADAR SIDOARJO

● Ke Halaman 10



Antrean SKCK...

permohonan SKCK di Polresta Sidoarjo. Kebetulan saya sedang mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), jadi sangat terbantu dengan layanan ekstra ini," ujar guru TK Baitul Rahman Jati itu, Kamis (18/9).

Lonjakan pemohon ini membuat Polresta Sidoarjo harus membuka layanan hingga pukul 00.00 pada Senin-Selasa. Namun, Rabu kemarin, pelayanan hanya sampai pukul 16.00.

Jika hari biasanya, pelayanan hanya sampai pukul 15.00. Sejak Senin-Rabu jumlah pemohon meningkat, dibanding hari biasanya. Senin tercatat

600 orang, Selasa naik menjadi 700 orang dan Rabu turun 400 orang.

Untuk mengantisipasi penumpukan, dua titik pelayanan dibuka, yakni di Mal Mini Pelayanan Polri (MMPP) Polresta Sidoarjo dan di lapangan tenis belakang Polresta.

Sementara itu, Kepala (KA) SPKT Polresta Sidoarjo Iptu Setyo Budi menegaskan, seluruh petugas sudah bekerja ekstra demi melayani masyarakat.

"Petugas harus melayani hingga larut malam untuk mengantisipasi penumpukan. Dua hari berturut-turut kami lembur sampai pukul 00.00. Ini wujud nyata pelayanan prima yang mengutamakan kebutuhan publik,"

terangnya.

Meski antrean panjang tak terhindarkan, pelayanan tetap berjalan tertib. Petugas mengatur alur antrean agar pemohon tetap nyaman.

Iptu Setyo juga mengimbau masyarakat agar tidak hanya menumpuk di Polresta, melainkan bisa memanfaatkan layanan di jajaran polsek sesuai edaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Harapan kami, masyarakat bisa memanfaatkan layanan di polsek. Dengan begitu tidak menumpuk di Polresta dan warga bisa lebih mudah mengurus SKCK di dekat rumahnya," tandasnya. (dik/gun)



Dorong IKM Naik Kelas, Kemenperin dan Bambang Haryo Gelar Diklat Wirausaha Baru di Sidoarjo



SIDOARJO-Upaya mendorong Industri Kecil dan Menengah (IKM) agar lebih berdaya saing terus dilakukan pemerintah. Kementerian Perindustrian bersama DPR RI Komisi VII menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) penumbuhan serta pengembangan wirausaha baru di Sidoarjo, Kamis (18/9).

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Sukartono (BHS) saat memaparkan terkait cara IKM naik kelas.

RI, Ir. H. Bambang Haryo Sukartono (BHS) menegaskan, pelatihan ini tidak hanya sebatas teori, tetapi juga dilengkapi dengan pendampingan serta akses permodalan berbunga rendah.

"Dalam diklat ini, selain pelatihan juga ada pendampingan langsung untuk mendapatkan modal. Kementerian Perindustrian sudah menyiapkan pembiayaan dengan bunga sangat rendah, sekitar lima persen, hampir sama dengan KUR," jelas BHS ke Radar Sidoarjo.

Politisi vokal dari Surabaya-Sidoarjo itu menambahkan, IKM harus memahami berbagai syarat untuk bisa naik kelas, mulai dari sertifikasi, manajemen produksi, pengemasan hingga strategi pemasaran.



SEMANGAT: Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Sukartono (BHS) bersama para pejabat terkait serta masyarakat optimis IKM di Sidoarjo naik kelas.

Ke Halaman 10

Dorong IKM Naik Kelas,...

"Yang paling penting adalah pendampingan dalam sertifikasi, manajemen produksi, packaging, dan pemasaran. Harapan kami, warga Sidoarjo bisa menjadi pengusaha industri yang handal," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Industri Kecil Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan Ditjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Bayu Fajar Nugroho, menilai Sidoarjo memiliki potensi besar untuk mengembangkan IKM.

Kami sudah memetakan bahwa Sidoarjo punya pasar yang besar. Artinya, dari mikro bisa naik ke kecil, kecil ke menengah, dan seterusnya. Ada komitmen dari Komisi VII, pemerintah daerah, dan tentu kami bersama-sama ingin meningkatkan daya saing IKM di sini," ungkap Bayu.

Di sisi lain, Kadisperindag Sidoarjo, Widyanoro Basuki, menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan dalam program ini.

"Kegiatan diklat ini luar biasa karena melibatkan narasumber yang bermutu. Dengan pendampingan selama empat sampai lima hari, IKM bisa naik kelas dan yang baru bisa berwirausaha. Harapan kami, pendampingan ini benar-benar berdampak nyata," ujarnya.

Dengan pasar yang dikelilingi Surabaya, Gresik, Pasuruan, dan Mojokerto, serta UMR yang sama sebesar Rp 4,8 juta, peluang produk IKM Sidoarjo untuk diminati masyarakat dinilai sangat besar. Program ini diharapkan mampu memperkuat posisi Sidoarjo sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terdepan di Indonesia. **(dik/gun)**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TNI-Polri Krian Kompak Renovasi RTLH di Sedenganmijen

Sidoarjo, Memorandum

Solidnya sinergitas TNI-Polri untuk masyarakat terlihat dalam kerja bakti merenovasi rumah warga di Desa Sedenganmijen, Kecamatan Krian, Kamis (18/9).

Personel dari Koramil dan Polsek Krian turun bareng bersama warga, merenovasi rumah Prayogo, warga setempat yang kurang layak huni. Sinergitas aparat keamanan di wilayah Krian tersebut patut menjadi contoh guna terwujudnya kamtibmas yang

aman dan kondusif di tengah masyarakat. Sinergitas antara TNI-Polri dalam karya bakti ini bukan hanya sebatas kegiatan simbolis, tetapi juga bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat. Melalui kebersamaan, diharap-

kan semakin mempererat hubungan kedua institusi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi warga yang membutuhkan.

Kapolsek Krian Kompol IGP Atma Giri menjelaskan, bahwa kegiatan ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial. "TNI-Polri akan terus hadir bersama masyarakat, bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga ikut serta dalam aksi nyata yang bermanfaat," ujarnya (sud/san/epe).



Personel TNI-Polri di Krian kompak merenovasi rumah tidak layak huni milik warga Desa Sedenganmijen.

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl Krebangan Barat Nomor 57 Surabaya, telp (031)3531476, fax (031)3531477

PENGUMUMAN:
(Tentang Sertipikat hilang)
Nomor: HP/02.04/2293/000-35.80/09/2025

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

No	NAMA ALAMAT PEMOHON	HAK ATAS TANAH JENIS & NOMOR HAK	NIB	TERDAFTAR ATAS NAMA	TANGGAL PEMBUKUAN	LETAK TANAH a. JALAN b. DESAKEL c. KEC	KETERANGAN
1.	RONALD WALLA Jl Dharmasada Indah 1 Blok L8-9 Kota Surabaya	Hak Milik No. 5231 Luas: 375 m ²	13688	ROSALINA ALI	11-09-2001	a. - b. Mojo c. Gubeng	• Surat Pernyataan di Bawah Sumpah / Janji tanggal 20 Agustus 2025. • Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan tanggal 14 Maret 2025 Nomor: SKTLK / 934 / III / 2025 / SPKT / POLRESTABES SURABAYA / POLDA JAWA TIMUR, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Kota Besar Surabaya.

Dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (Tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Surabaya, 02 SEP 2025

An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
Kepala Badan Pertanahan Nasional
An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
Kepala Badan Pertanahan Nasional

Surabaya, 02 SEP 2025

Surabaya, 02 SEP 2025

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl Krebangan Barat Nomor 57 Surabaya, telp (031)3531476, fax (031)3531477

PENGUMUMAN:
(Tentang Sertipikat hilang)
Nomor: HP/02.04/2293/000-35.80/09/2025

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

No	NAMA ALAMAT PEMOHON	HAK ATAS TANAH JENIS & NOMOR HAK	NIB	TERDAFTAR ATAS NAMA	TANGGAL PEMBUKUAN	LETAK TANAH a. JALAN b. DESAKEL c. KEC	KETERANGAN
1.	TINI Jl Kapas Madya Baru 1085 Kota Surabaya	Hak Milik No. 867 Luas: 30 m ²	04049	TINI	23-07-2018	a. Kapas Baru 10 b. Kapas Madya Baru c. Rungkut	• Surat Pernyataan di Bawah Sumpah / Janji tanggal 12 September 2025. • Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan tanggal 04 Juni 2025 Nomor: SKTLK / 1753 / VI / 2025 / SPKT / POLRESTABES SURABAYA / POLDA JAWA TIMUR, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Kota Besar Surabaya. • Nomor Pengumuman HP/02.04/2611/000-35.80/IX/2025, tanggal 17 September 2025.
2.	DHENOK INTAN SAVITRI Jl Gading Indah Utara 3/16 Kota Surabaya	Hak Guna Bangunan No. 119 Luas: 63 m ²	01233	DHENOK INTAN SAVITRI	14-06-2007	a. Bulak Setro Indah II Blok A No.3 b. Bulak c. Bulak	• Surat Pernyataan di Bawah Sumpah / Janji tanggal 08 September 2025. • Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan tanggal 03 September 2025 Nomor: SKTLK / 2993 / IX / 2025 / SPKT / POLRESTABES SURABAYA / POLDA JAWA TIMUR, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Kota Besar Surabaya. • Nomor Pengumuman HP/02.04/ 2630/000-35.80/IX/2025, tanggal 17 September 2025.
3.	UMI NADIRO Jl Tambak Wedi 3- Kota Surabaya	Hak Milik No. 4269 Luas: 64 m ²	02352	1. NANNYATUL ROFA 2. UMI NADIRO	11-03-2019	a. - b. Tambak Wedi c. Kenjeran	• Surat Pernyataan di Bawah Sumpah / Janji tanggal 08 September 2025. • Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan tanggal 05 Agustus 2025 Nomor: SKTLK / 2570 / VIII / 2025 / SPKT / POLRESTABES SURABAYA / POLDA JAWA TIMUR, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Kota Besar Surabaya. • Nomor Pengumuman HP/02.04/2631/000-35.80/IX/2025 tanggal 17 September 2025.

Dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (Tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Surabaya, 02 SEP 2025

An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
Kepala Badan Pertanahan Nasional
An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
Kepala Badan Pertanahan Nasional

Surabaya, 02 SEP 2025

Surabaya, 02 SEP 2025

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KELANA JATIM

HUT PMI ke 80, UTD PMI Sidoarjo Beri Doorprize Menarik

Sidoarjo, Bhirawa

PMI Sidoarjo, Kamis (18/9) pagi kemarin, melakukan pengundian doorprize bagi pendonor darah yang telah mendonorkan darahnya pada Hari Rabu (17/9). Undian doorprize untuk memeriahkan peringatan HUT PMI.

Menurut Ketua Bidang Donor darah di jajaran pengurus UTD PMI Sidoarjo, Asyiq Yusak, pengundian doorprize itu untuk meramaikan peringatan Hari PMI ke 80 tahun 2025.

"Di Kabupaten Sidoarjo resepsi peringatan HUT PMI akan kami lakukan pada Sabtu, 20 September 2025, di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo," kata Asyiq, Kamis (18/9) kemarin, disela-sela acara pengundian doorprize.

Pengundian doorprize yang dilakukan termasuk pra resepsi peringatan HUT PMI ke 80 oleh PMI Sidoarjo. Panitia menyediakan hadiah seperti satu sepeda MTB, satu rice cooker, satu kipas angin berdiri, satu setrika, satu blender, dan satu kompor gas.

Disaksikan Pengurus UTD PMI Sidoarjo, karyawan PMI Sidoarjo, pendonor darah dan unsur media, enam buah doorprize diundi secara terbuka di ruang front office UTD PMI Sidoarjo. Acara pengundian juga disebarkan secara live melalui media sosial milik UTD PMI Sidoarjo. [kus.fen]

Said Abdullah Menilai, Penempatan Dana Rp200 T di Bank Himbara Tak Melanggar Aturan

Sumenep, Bhirawa

Kementerian Keuangan menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun pada Bank-Bank Milik Negara (Himbara) tidak menyalahi aturan.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mengatakan, kebijakan dasar hukum penempatan dana ini jelas tercantum dalam UU APBN Tahun 2025, Pasal 31 ayat 2 dan 3. Regulasi itu memberikan kewenangan kepada bendahara negara untuk mengelola Saldo Anggaran Lebih (SAL), termasuk menempatkannya tidak hanya di Bank Indonesia, tetapi juga pada lembaga tertentu yang telah diatur.

"Jadi, penempatan Rp200 triliun itu bagi DPR no issue. Clear kalau dari sisi DPR, landasan hukumnya ada. Bukan tidak ada landasan hukumnya yakni UU APBN Tahun 2025, Pasal 31 ayat 2 dan ayat 3," kata Said Abdullah, Kamis (18/09).

Politisi asal Madura itu menegaskan, Banggar DPR justru tidak melihat kebijakan tersebut dari sisi legalitas semata. Yang lebih penting memastikan dana jumbo itu benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

"Justru isunya bagi DPR adalah Rp200 triliun itu agar mampu meningkatkan produktivitas, daya beli, sehingga ekonomi bisa tumbuh," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan resmi mengucurkan dana pemerintah Rp200 triliun ke lima bank Himbara, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Kebijakan itu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, penempatan dana itu bertujuan memperkuat likuiditas perbankan agar penyaluran kredit meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. [sul.fen]

MITRA

Kopyah Hitam Bersejarah, Yang Telah Merubah Hidup



Wahyu Herizon Made

KEPALA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sidoarjo, yang sejak bertahun-tahun kosong, akhirnya terisi juga pimpinannya, saat pelantikan pejabat di Kabupaten Sidoarjo, Rabu (17/9) kemarin.

Wahyu Herizon Made SSTP MAP, mantan Kabid Pengendalian operasional dan keselamatan Dishub Kabupaten Sidoarjo, dipromosi dan dipercaya menjadi Kabag Pengadaan Barang dan jasa pada OPD yang berada dalam lingkup Setda Sidoarjo itu.

►► ke halaman 11

Jawa Pos

Kopyah Hitam Bersejarah, Yang Telah Merubah Hidup

● Sambungan hal 1

Ditemui saat pelantikan di pendopo delta wibawa Sidoarjo, dirinya bercerita dan ngobrol santai, kopyah hitam yang ia pakai, saat pelantikan, kemarin, dianggap telah merubah hidupnya.

Kopyah yang ia pakai tersebut, menurut Alumni SMAN 1 Sidoarjo itu, telah pertama kali ia pakai saat pelantikan pertama dirinya menjadi seorang CPNS kabupaten Sidoarjo pada tahun 1998 lalu.

“Kopyah yang saya pakai ini punya sejarah. Kopyah ini saya pakai saat pertama kali menjadi CPNS Sidoarjo,” cerita ayah dua orang anak itu.

Ternyata meski dirinya seorang non muslim, saat memakai kopyah hitam ukuran 8 itu, tampak pas dan sesuai. Kalau istilah orang Jawa disebut mantensi.

Sebab kadang, ada orang yang memakai kopyah, namun tampilannya masih kurang matching. Apa karena kopyah yang dipakai ukurannya terlalu besar atau terlalu kekecilan.

Pendapat pejabat yang tinggal di perumahan Maggersari Permai Sidoarjo itu, sebuah kopyah dipakai bukan untuk masalah agama saja, tetapi lebih tepatnya, secara universal dipakai untuk masalah budaya. Sebagai simbol budaya bangsa. Khususnya Bangsa Indonesia. Karena hanya orang Indonesia yang punya tradisi memakai kopyah.

“Siapa saja orang Indonesia bisa memakai kopyah. Tidak melihat dari golongan suku dan agamanya apa,” ujarnya.

Karena kopyah tersebut dianggap memiliki sejarah dalam hidupnya, setiap kali ada acara pelantikan-pelantikan pejabat, kopyah tersebut yang ia selalu pakai.

“Meski saya non muslim saya punya 3 kopyah. Ini yang saya pakai saat acara pelantikan, lainnya saya pakai saat kegiatan hari Korpri dan kegiatan lainnya,” katanya tertawa. [kus.gat]

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Bupati yang punya wewenang melakukan mutasi. Namun, prosesnya lebih elok dengan tetap ada komunikasi dengan wabup."

Suyarno
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo

Waktu Pilkada Satu Paket, Sudah Seharusnya Kompak

POLEMIK mutasi di lingkungan pemkab mendapat perhatian legislatif. Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno menyebut persoalan itu tidak seharusnya terjadi. "Ya, kuncinya di komunikasi," katanya.

Komunikasi itu, lanjutnya, harus diperbaiki oleh keduanya. Sebab, dampaknya dinilai tidak baik bagi eksekutif. "Kah waktu pilkada satu paket. Jadi sudah seharusnya kompak," ujarnya.

Suyarno menambahkan, mutasi memang menjadi otoritas bupati. Tetapi, klaim wabup yang tidak diajak komunikasi juga perlu diperhatikan. "Bupati yang punya wewenang melakukan mutasi. Namun, prosesnya lebih elok dengan tetap ada komunikasi dengan wabup," terangnya.

Lebih lanjut, dia meyakini mutasi tidak dilakukan sembarangan. Suyarno yakin bupati punya banyak per-

timbangan sebelum mengambil keputusan. "Nggak gampang menentukan orang yang dipercaya di bidang tertentu," ungkapnya.

Suyarno menilai perselisihan keduanya hanya masalah miskomunikasi. Dia berharap tidak sampai berlarut. "Tentu semua berharap pemerintahan yang solid sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik," tandasnya. **(edi/uzi)**

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dispenda Jatim

Sosialisasi Opsen PKB, BBNKB, dan BPHTB di Desa Grabagan

SIDOARJO - Puluhan warga menghadiri sosialisasi Opsen PKB, Opsen BBNKB serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang digelar Dispenda Jatim bersama Satlantas, di Kantor Desa Grabagan, Kamis (18/9/25). Sosialisasi tersebut juga dihadiri anggota DPRD Sidoarjo, Muhammad Dian Felani.

Dalam kegiatan tersebut dijelaskan pentingnya masyarakat memahami ketentuan pajak daerah, khususnya terkait opsen atau bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selain itu, peserta juga diberikan penjelasan mengenai BPHTB sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor pajak.

Kepala Bidang Pajak Daerah Dispenda Provinsi Jawa Timur yang hadir dalam kegiatan itu menyampaikan bahwa tujuan utama sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibannya atas kepemilikan tanah maupun kendaraan.



Dispenda Provinsi Jawa Timur gelar sosialisasi gandeng Satlantas di Aula Balai Desa Grabagan, Kamis (18/9/25).

"Intinya, masyarakat harus paham bahwa setiap hak yang dimiliki atas tanah maupun kendaraan juga diikuti kewajiban, salah satunya membayar pajak. Dengan pajak yang tertib, maka pembangunan daerah bisa berjalan lancar dan hasilnya kembali untuk masyarakat," jelasnya.

Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Muhammad Dian Felani, menyampaikan bahwa sosialisasi ini diharapkan dapat menambah

pemahaman masyarakat. "Pajak daerah yang dibayarkan masyarakat nantinya kembali untuk pembangunan daerah, termasuk fasilitas umum yang manfaatnya bisa dirasakan langsung. Dan apabila tidak tercapai, maka pembangunan akan mengalami keterlambatan," ujarnya.

Sementara Kades Grabagan Kamadi menyampaikan tanggapannya, kegiatan sosialisasi Pajak Opsen PKB, BBNKB, dan BPHTB ini

sangat bagus karena mengingatkan warga untuk segera melaksanakan pembayaran.

"Sebagai warga negara yang baik, kita harus taat pajak. Harapan pemerintah desa, supaya pembangunan di Kabupaten Sidoarjo lebih baik dari segala bidang dan merata, bisa manfaat kembali kepada masyarakat," pungkask Kamadi.

Aipda Dian Anak Angger Abdillah, narasumber mewakili Satlantas Polresta Sidoarjo kepada Duta Masyarakat (duta.co) Kamis (18/9/25) juga menjelaskan bahwa registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Regident Ranmor) merupakan fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal-usul, kepemilikan, serta pengoperasian kendaraan.

"Selain itu, Regident juga memiliki fungsi kontrol, forensik kepolisian, dan pelayanan kepada masyarakat. Semua proses itu dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang terintegrasi dengan pembayaran pajak, bea balik nama, maupun sumbangan wajib dana

kecelakaan lalu lintas," jelas Aipda Angger.

Ia menambahkan, kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan dokumen resmi dari Polri, yaitu STNK sebagai bukti legitimasi pengoperasian, BPKB sebagai legitimasi kepemilikan, serta TNKB atau pelat nomor sebagai tanda pengoperasian di jalan.

"Selain itu ada tahapan cek fisik kendaraan, sertifikat uji tipe, hingga registrasi yang memastikan kendaraan sesuai aspek teknis dan keselamatan. Semua itu wajib dipenuhi agar kendaraan sah secara hukum dan aman digunakan di jalan raya," pungkasknya.

Salah satu warga yang hadir, Bayu Peradaban warga Wersah RT 18 Desa Grabagan, menilai kegiatan ini positif. "Kita bisa mengetahui mekanisme dan syarat untuk kepemilikan hak atas tanah. Untuk kendaraan, pemerintah juga mengimbau kalau kendaraan itu beroperasi di wilayah Sidoarjo, hendaknya pembayaran pajaknya dilakukan di Sidoarjo agar menamb

bah PAD," ujar Bayu. ● Loe

Editor: Imam Ghozali | Layouter: Yudihi

DUTA

HOUSING

RSUD Notopuro Edukasi Kesehatan Kulit dan Kecantikan untuk Kader PKK

SIDOARJO – Ratusan ibu kader PKK se-Sidoarjo mendapat sosialisasi kesehatan kulit, perawatan gigi anak, hingga kecantikan di RSUD R.T. Notopuro, kemarin (18/9). Mereka tak hanya disugahi materi, tetapi juga bisa berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis di Klinik Estetika.

Direktur RSUD R.T. Notopuro dr Atok Irawan menegaskan, layanan estetika bukan semata urusan penampilan. "Klinik Estetika tidak hanya kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga preventif. Diharapkan bisa men-



ANGGER BONDAN/JAWA POS

BELAJAR BARENG: Dari kiri, dr Arieq Desnantika, dr Dhita Karina, dan drg Barnabas Bornardo memberikan edukasi seputar perawatan kulit, estetika, bedah plastik modern serta kedokteran gigi anak saat acara bincang cantik di RSUD R.T. Notopuro kemarin (18/9).

dukung kesehatan sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat," jelasnya.

Tiga dokter spesialis hadir memberi edukasi, yakni dr Arieq Desnantika, Sp.BP-RE

(bedah plastik rekonstruksi dan estetika), dr Dhita Karina, Sp.DVE, FINSVD (dermatologi & venerologi), serta drg Barnabas Bornardo, Sp.KGA (kedokteran gigi anak).

Atok menambahkan, keberadaan Klinik Estetika di RSUD R.T. Notopuro membuat warga Sidoarjo tak perlu lagi jauh-jauh keluar kota, bahkan ke luar negeri, untuk memperoleh layanan serupa. Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo dr Sriatun Subandi mengatakan edukasi itu bermanfaat bagi para kader dalam menyampaikan pesan kesehatan ke masyarakat. "Kegiatan ini membantu kami mengedukasi keluarga di Sidoarjo agar semakin sadar pentingnya hidup sehat sekaligus merawat diri," katanya. (eza/uzi)

Jawa Pos

Beda Pandangan di Mutasi Pejabat Pemkab Sidoarjo

Subandi-Mimik Pecah Kongsi

Hubungan Bupati dan Wabup Sidoarjo semakin memanas. Gara-garanya, Wabup Sidoarjo Mimik Idayana merasa masukkannya dalam rapat Tim Penilai Kinerja (TPK) ASN tidak diakomodasi. Mimik pun enggan hadir dalam pelantikan di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (17/9).

MIMIK menilai pelantikan itu cacat prosedural karena dirinya selaku pengarah TPK ASN tidak pernah menerima laporan progres kinerja pejabat yang dimutasi. Mimik mengatakan bahwa masukan dirinya dalam rapat TPK tidak pernah diakomodasi. "Saya sudah kirimkan surat permintaan progres kinerja TPK tanggal 16 September 2025, tapi hingga proses pelantikan itu digelar, tidak ada sama sekali laporan kinerja dari TPK ke saya, saya kecewa dengan TPK," ujarnya.

Baru Tahu setelah Pelantikan

Mimik sebagai pengarah 2 TPK sebelumnya sudah mengikuti rapat-rapat TPK sebelum pelantikan. Tim ini tugasnya untuk mengkaji kelayakan PNS yang akan menduduki jabatan. Namun, masukan wabup dalam rapat TPK tidak digubris. Mimik



PICU POLEMIK: Sejumlah pejabat Pemkab Sidoarjo mengikuti pelantikan di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (17/9).



Saya sudah kirimkan surat permintaan progres kinerja TPK tanggal 16 September 2025, tapi hingga proses pelantikan itu digelar, tidak ada sama sekali laporan kinerja dari TPK ke saya, saya kecewa dengan TPK."

Mimik Idayana
Wakil Bupati Sidoarjo



Semua izin mutasi berasal dari BKN. Dari pusat ke regional, lalu kembali ke daerah, baru diproses tim. Jadi tidak ada ruang untuk main-main."

Subandi
Bupati Sidoarjo

BUPATI SUBANDI

Mutasi sudah melalui persetujuan BKN mulai dari regional hingga pusat sebelum diproses di daerah. Menggunakan prinsip manajemen talenta dalam penempatan pejabat, sesuai kompetensi, potensi, dan kinerja.

Penerapan sistem I-MUT (Integrated Mutasi) sebagai upaya mencegah kesalahan dan melindungi ASN dari praktik kesewenang-wenangan.

SUMBER: DILAH DARI BERBAGAI SUMBER

Sudah Sesuai Prosedur

Sementara itu, Plt Kepala Kantor Regional (Kakanreg) II BKN Basuki Ari Wicaksono memastikan proses mutasi itu sudah sesuai aturan. Usulan

mutasi dari daerah diajukan ke BKN Pusat, disetujui, lalu dikembalikan ke daerah. Menurutnya semua tahapan mutasi dilakukan satu pintu melalui BKD Sidoarjo.

Basuki Ari menegaskan tidak akan pernah mengeluarkan izin jika persyaratan tidak terpenuhi. Mengenai mutasi lanjutan, kewenangan sepenuhnya berada di tangan Bupati Sidoarjo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). "Setelah itu sudah menjadi kewenangan bupati untuk meng-SK-kan dan melantik pejabat daerah," katanya.

Disetujui BKN

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, nama calon pejabat diusulkan ke BKN Regional, lalu ke BKN Pusat. Setelah mendapat persetujuan, barulah Tim Penilai Kinerja (TPK) memproses dan menetapkan hasilnya. "Prinsip yang dipakai adalah manajemen talenta, menempatkan pejabat sesuai kompetensi, potensi, dan kinerja," ujarnya.

Subandi menjelaskan, mutasi di sudah berbasis layanan digital I-MUT (Integrated Mutasi). Sistem itu mencegah kesalahan dan melindungi ASN dari praktik kesewenang-wenangan.

Bahkan menurutnya, Sidoarjo jadi salah satu daerah pertama di Indonesia yang menerapkan manajemen talenta berbasis I-MUT. "Semua izin mutasi berasal dari BKN. Dari pusat ke regional, lalu kembali ke daerah, baru diproses tim. Jadi tidak ada ruang untuk main-main," ungkapnya. (eza/uzi)

POLEMIK
MUTASI
PEJABAT

WABUP MIMIK IDAYANA

Menilai pelantikan cacat prosedural karena tidak ada laporan progres kinerja TPK yang ia terima.

Masukan tidak diakomodir, bahkan ia baru mengetahui daftar pejabat yang dimutasi dari pemberitaan media.

Kecewa pada TPK, merasa perannya sebagai pengarah TPK diabaikan dalam proses mutasi.

bahkan baru mengetahui daftar nama pejabat yang dimutasi dari berita yang muncul pasca pelantikan.

Jawa Pos



Pelantikan pejabat di Pemkab Sidoarjo

LOKIF/DUTA

BKN : Mutasi Pejabat Pemkab Sudah Sesuai Aturan

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan mutasi pertama pejabat pada Rabu kemarin (17/9/25). Para pimpinan perangkat daerah itu disumpah dan dilantik untuk menduduki posisi baru atau diangkat dalam jabatan yang sebelumnya diemban sebagai pelaksana tugas (Plt). Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan, proses mutasi tersebut sudah sesuai aturan dan ketentuan.

Pelantikan yang tanpa dihadiri Wabup Sidoarjo Hj Mimik Idayana, yang merasa kecewa tersebut tetap terlaksana.

Plt Kepala Kantor Regional (Kakanreg) II BKN, Basuki Ari Wicaksono, menyampaikan bahwa dari segi manajemen tata negara, proses dan tahapan mutasi telah dilengkapi. Usulan dan izin mutasi pejabat Pemkab Sidoarjo sudah diajukan ke BKN Pusat dan disetujui, lalu hasilnya dikembalikan lagi ke daerah.

"Setelah itu sudah menjadi kewenangan bupati untuk meng-SK-kan dan melantik," jelas Basuki Ari kepada media usai pelantikan pejabat Pemkab Sidoarjo.

Apakah tahapan itu telah sesuai aturan? Basuki Ari memastikan semuanya sudah lengkap. "Tentang rincian, SK, kemudian tahapannya apa saja, nanti dilakukan satu pintu

di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo. Yang jelas, kami tidak akan memberikan izin jika tahapan-tahapan atau syarat-syaratnya tidak dipenuhi," tegasnya.

Ditanya soal mutasi selanjutnya, Basuki Ari menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati Sidoarjo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). "Itu kewenangan bupati atau wali kota selaku PPK," imbuhnya.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, mutasi dan pelantikan pejabat tidak bisa dilakukan mendadak, melainkan butuh waktu beberapa pekan untuk memprosesnya. Nama-nama calon pejabat yang akan dimutasi diusulkan ke BKN Regional, kemudian ke BKN Pusat.

Menurutnya, penempatan pejabat dilakukan sesuai kompetensi melalui manajemen talenta, sehingga tidak ada lagi loncatan antar-eselon. "Pengembangan karir ASN disesuaikan dengan kompetensi, potensi, dan kinerja individu. Landasannya merit system sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN," jelas Subandi.

Ia juga menambahkan, Pemkab Sidoarjo telah menggunakan layanan I-MUT (Integrated Mutasi) untuk mencegah kesalahan serta melindungi ASN dari praktik kesewenang-wenangan. Kabupaten Sidoarjo termasuk daerah pertama di Indo-

nesia yang menerapkan manajemen talenta dan layanan I-MUT dalam penempatan pejabatnya.

"Jadi, izin mutasi itu prosesnya dari BKN Pusat ke regional, lalu ke daerah, kemudian diproses Tim Penilai Kinerja (TPK). Kita baru melantik setelah ada izin dari BKN," jelas Subandi.

Dalam sambutannya di hadapan para pejabat dan Kakanreg II BKN, Bupati Subandi menegaskan bahwa BKD adalah fondasi pembenahan pemerintahan. Ia berharap mutasi ini benar-benar sesuai arahan BKN.

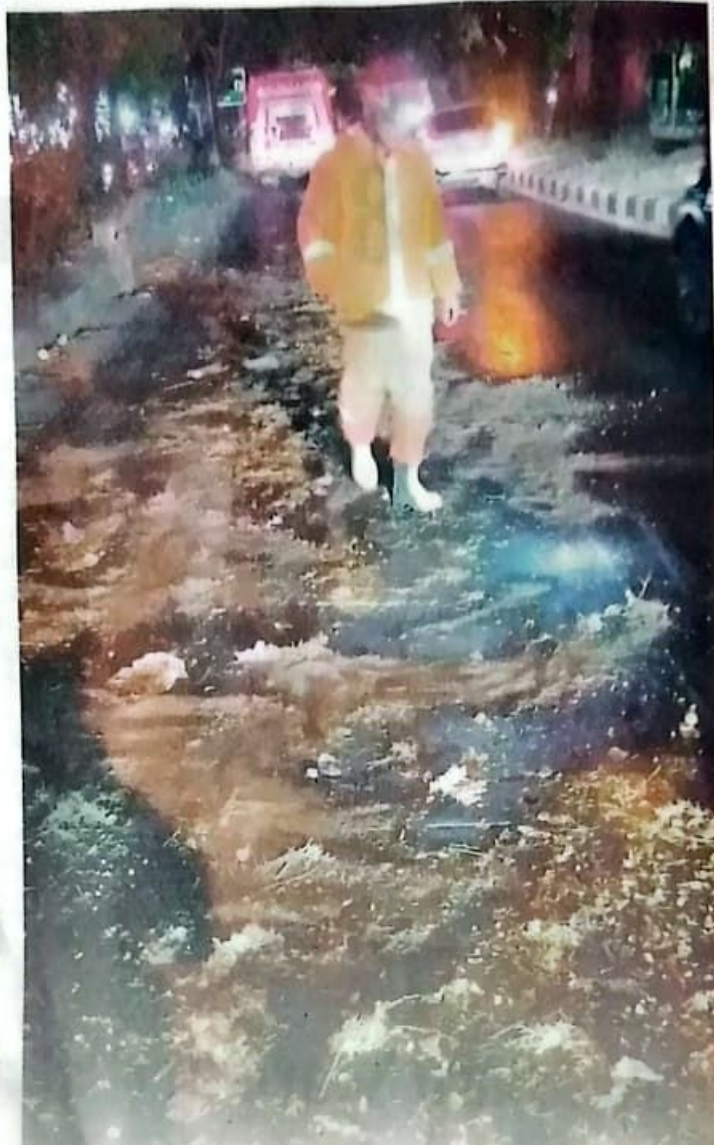
"Mutasi, rotasi, dan promosi merupakan hal lumrah dalam pengembangan karir pegawai. Tidak ada istilah bupati senang atau tidak senang. Semua dijalankan dengan merit system. Insya Allah berjalan baik sesuai arahan BKN, baik oleh bupati, wakil bupati, maupun TPK ASN," katanya Kamis (18/9/25).

Mutasi di Kabupaten Sidoarjo diharapkan tidak hanya menempatkan pejabat yang cakap secara teknis, tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan yang kuat serta siap membawa perubahan. "Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama. Pejabat harus lebih inovatif, kreatif, cepat, dan tanggap serta berani membuat terobosan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat," pungkas Subandi. • Loe



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Belasan Pemotor Terjungkal Akibat Tumpahan Minyak

LICIN:
Petugas damkar
membersihkan
minyak yang
berceceran di
Jalan Raya Juanda,
Rabu (17/9) malam.

SIDOARJO - Belasan pemotor terjungkal akibat tumpahan minyak di Jalan Raya Juanda, Rabu (17/9) malam. Beruntung, tidak ada yang terluka parah. BPBD Sidoarjo mencatat proses pembersihan jalan berlangsung selama dua jam.

Staf Humas Damkar BPBD Sidoarjo Yoli Wisnu mengungkapkan, kejadian itu dilaporkan pukul 17.30. Tumpahan minyak memanjang sekitar 50 meter. "Membuat banyak

pengendara motor terjatuh. Belasan," ujarnya kemarin (18/9).

Menurut warga, tumpahan minyak berasal dari muatan pikap yang melintas. Yoli menyebut ada satu jerigen yang terjatuh dan pecah. "Bak belakangnya terbuka sehingga terjatuh," jelasnya.

Yoli menerangkan, ceceran minyak awalnya diuruk dengan pasir sebelum disemprot air. "Korban pengendara motor yang terjatuh tidak sampai terluka parah," ungkapnya. (edi/uzi)

Jawa Pos

Dispendukcapil Terima 196 Ribu Blangko E-KTP

Stok Aman hingga Tahun Depan

SIDOARJO - Stok blangko KTP elektronik (e-KTP) di Kabupaten Sidoarjo dipastikan aman hingga 2026. Sebanyak 196 ribu keping blangko KTP-el sudah siap digunakan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo Reddy Kusuma menyampaikan, jumlah blangko yang datang lebih besar dibandingkan kebutuhan rata-rata per tahun yang mencapai sekitar 150 ribu

keping. "Sidoarjo ini setahun bisa 150 ribu cetak KTP, karena sekarang sudah masuk bulan September, insya Allah stok yang masuk aman sampai 2026," ujarnya saat sosialisasi hasil pengadaan hibah blanko e-KTP tahun anggaran 2025 kemarin (18/9).

Reddy menjelaskan, pengadaan blangko tersebut dilakukan melalui Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri. Pemkab Sidoarjo hanya mentransfer dana hibah senilai Rp 2 miliar, sementara proses pengadaan sepenuhnya diurus pusat. "Prosesnya memakan

waktu tujuh bulan. Blangko baru datang Rabu (17/9) dan sudah diserahkan ke kami," jelasnya.

Setelah menerima blanko, Dispendukcapil langsung mendistribusikannya ke seluruh kecamatan. Untuk tahap awal, setiap kecamatan mendapat jatah 1.500 keping atau total 27.500 keping yang sudah disalurkan dinas. "Kecamatan bisa mengambil lagi ke kami. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir," katanya. Sehingga, warga bisa mengurus e-KTP di kantor kecamatan masing-masing sesuai domisili. (eza/uzi)



STOK MELIMPAH: Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih (tengah) didampingi Kepala Dispendukcapil Sidoarjo Reddy Kusuma menyerahkan blangko kepada Camat Candi Yuni Rismawati di Kantor BKD Sidoarjo kemarin (18/9).

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Tetap Terjaga Usai Dipakai Tanding Piala Asia U-23

Usai hiruk pikuk pertandingan Piala Asia U-23, awal Bulan September 2025 ini, suasana Stadion Gelora Delta Sidoarjo tampak baik-baik saja. Menjadi tuan rumah dari laga-laga internasional, tentunya dipadati ribuan penonton yang antusias apa lagi Timnas Indonesia turut bertanding, stadion kebanggaan masyarakat Sidoarjo itu tetap terjaga. Tidak ada kerusakan, kondisinya dinilai tetap representatif.

Mutiara Mujahidah H., magang Sidoarjo

Menurut penuturan pengelola Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Suyanto, dipastikan semua fasilitas stadion masih dalam keadaan baik.

"Stadionnya aman-aman saja, tidak ada kerusakan sama sekali, setiap hari selalu kita pantau dan jaga," ujarnya, Sabtu (13/9) akhir pekan lalu.

Dirinya menuturkan, perawatan lapangan terus dilakukan

setiap hari, agar selalu tetap siap digunakan. Rumput stadion disiram rutin dua kali sehari, pada pukul 07.00 dan 16.00, masing-masing selama 30 menit.

"Dengan perawatan rutin, kondisi rumput tetap hijau dan terjaga sampai sekarang," ujarnya.

Selain penyiraman, kebersihan stadion juga dijaga. Sampah dari dalam maupun luar stadion dibersihkan setiap hari.

"Kami lakukan penyiraman,



Mutiara Mujahidah
Lapangan stadion gelora delta Sidoarjo, difoto dari atas tribun penonton.

pembersihan, sampai penanganan sampah dari luar hingga ke dalam stadion," jelasnya.

Meski akses ke dalam stadion lebih dibatasi demi keamanan

aset, masyarakat tetap diberi ruang untuk berolahraga. Setiap hari pintu B dibuka, khusus hari Minggu juga dibuka pintu H.

Supaya area di luar stadion

tetap bisa digunakan masyarakat untuk jogging dan aktivitas olahraga lainnya.

Stadion Gelora Delta tidak

» ke halaman 11

HARIAN
Bhirawa
Sidoarjo Delta Sidoarjo

Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Tetap Terjaga Usai Dipakai Tanding Piala Asia U-23

● Sambungan hal 1

hanya untuk sepak bola. Fasilitas atletik yang ada juga bisa dimanfaatkan atlet maupun masyarakat untuk latihan dan kejuaraan. Hal ini membuat Gelora Delta menjadi ruang olahraga multifungsi.

Ketua KONI Kabupaten Sidoarjo, Imam Mukri Affandi, juga memberikan apresiasi atas kondisi

stadion setelah sukses menyelenggarakan laga-laga Piala Asia U-23. Menurutnya, stadion Gelora Delta menunjukkan kesiapan sebagai venue internasional.

"Kesan saya ketika penyelenggaraan kejuaraan sepak bola Asia U-23 kemarin, luar biasa persiapan maupun pelaksanaan yang ada di Gelora Delta Sidoarjo ini," sebutnya.

Imam menegaskan, keberadaan

stadion berstandar internasional seperti Gelora Delta akan membawa banyak manfaat bagi Sidoarjo.

"Event olahraga bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi sekaligus mempersatukan warga. Jadi saya pikir Sidoarjo tepat untuk penyelenggaraan event-event olahraga internasional," ujarnya.

Pasca renovasi oleh Kementerian PUPR, sejumlah fasilitas stadion juga semakin modern. Terlihat, Tribun kini

dilengkapi kursi single seat, pencahayaan lapangan lebih terang tanpa menghalangi pandangan penonton, serta tambahan videotron untuk mendukung pertandingan.

"Semoga seterusnya Stadion Gelora Delta ini tidak hanya menjadi ruang bagi Timnas maupun event besar, tetapi juga tetap menjadi ruang olahraga dan kebanggaan masyarakat Sidoarjo," ujar Imam.[gat]

HARIAN
Bhirawa
Sidoarjo Delta Sidoarjo